

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Konsep Relokasi Pasar

a. Pengertian Relokasi

Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara atau negara lain untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Menurut kamus besar bahasa indonesia relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus besar bahasa indonesia 1982:739).

b. Pengertian Pasar

Pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainnya, untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. (Amir, 2000:186). Perumusan pasar dan pengertian dalam bidang ekonomi terdiri atas lima komponen yaitu:

- 1) Adanya wilayah (*area place*).
- 2) Adanya pelaku (*subject*) penjual dan pembeli.
- 3) Adanya kegiatan untuk saling berhubungan antar subjek pasar.
- 4) Adanya objek (barang-barang dan jasa).
- 5) Faktor waktu.

Menurut J.F Deniau (Amir, 2000:189). pasar pada tingkat pertama adalah suatu tempat berjualan (*a place of sale*). Semenjak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Negara-Negara anggota pasar bersama, Eropa khususnya dalam bidang ekonomi, maka timbul gagasan di sementara Negara baik di Asia dan Negara lain yang serupa untuk mendirikan persekutuan yang serupa dengan Negara tetangga yang disebut dengan pasar regional bersama.

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Oleh karena itu bagian ini membahas tentang pasar. Selain itu aspek yang tidak kalah menariknya untuk didiskusikan adalah aspek ruang dan waktu dari pasar serta dari pasar serta aspek tawar menawar yang terjadi di pasar (Damsar, 1997:101).

2. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu:

- a. Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi atau produk dari perusahaan tertentu.

- b. Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.
- c. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen (Damsar,1997: 106-107).

3. Kebijakan Pemerintah

a. Definisi kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewit yang dikutip Charles O. Jones, dalam Suharno (2010:12) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.

Richard Rose dalam Suharno (2010: 11-12) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan kebijakan hendaknya sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

b. Tujuan Kebijakan

Konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan

dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena adanya suatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya kenakalan remaja). Edi Suharto, 2005: 61). Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah meluasnya masalah, dan mencegah terulangnya kembali suatu masalah, atau pengembangan dalam arti (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya). Secara lebih rinci, tujuan kebijakan sosial adalah:

- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang

disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.

- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi, yang kondusif bagi upaya pelaksanaan pelaksanaan peran-peran sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Edi Suharto, 2005: 59-62).

c. Analisa Kebijakan

Menurut E.S. Quade dalam Rian Nugroho (2003: 83) mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Kita melihat kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1998. Kita melihat kebijakan pemerintah di tahun 1999 untuk mengizinkan jajak pendapat di timor-timur menghasilkan disintegrasi kawasan tersebut dan menciptakan konflik akut diantara sesama penduduk timor maupun dengan veteran dan janda operasi seroja.

Menurut David. S Savicky dalam Rian Nugroho (2003: 84) dengan gamblang menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya suatu kebijakan, baik

kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

Menurut Dunn analisa kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah suatu hal yang harus bagi perumusan kebijakan, namun tidak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Meski analisa kebijakan lebih fokus pada perumusan, pada prinsipnya setiap analisa kebijakan pasti mencakup evaluasi kebijakan.

Analisis kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif, yang hanya memberikan gambaran dan analisis perspektif, yang menekankan kepada rekomendasi-rekomendasi. Analisis deskriptif oleh Micael disebut sebagai *ex-post*, analisa kebijakan yang baik adalah analisa yang bersifat *preskriptif*, karena memang perannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil (Rian Nugroho, 2003: 87-88).

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah

melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan (Nyoman Sumaryadi, 2010: 83).

4. Teori Perubahan Sosial

a. Definisi perubahan sosial

Perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang hidup manusia. Secara umum gambaran mengenai perubahan sosial pada masyarakat dapat berupa perubahan mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan interaksi sosial

Pemikiran William F. Ogburn disini mengenai ruang lingkup dari perubahan sosial itu sendiri dimana ruang lingkup tersebut meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Sedangkan menurut Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dengan cara-cara yang telah diterima baik

karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2010: 262-263).

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial antara lain:

1) Faktor internal

Faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosiogenik; artinya masyarakat itu sendirilah yang merupakan sumber perubahan sosial, masyarakat di sini dapat bersifat kolektif maupun individual. Faktor internal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi: faktor internal manifest atau yang disengaja (*intended*) dan yang laten atau tidak disengaja (*unintended*).

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misal: sifat kependudukan, perubahan lingkungan, penjajahan dan agama.

b. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

1) Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat

Perubahan yang lambat biasa di sebut evolusi, perubahan ini memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan

keadaan-keadaan yang baru. Perubahan cepat atau revolusi, perubahan ini menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat dan terjadinya dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran kecepataannya perubahan ini bersifat relatif, karena dapat memakan waktu lama.

2) Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Batas-batas perubahan ini relatif, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sebaliknya perubahan yang terjadi pada masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialisasi misalnya, itu adalah perubahan besar karena berpengaruh pada masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 269-271).

3) Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa kehendak, serta berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 272).

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan, apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Sebab keadaan sistem sosial itu tidak hanya berdimensi tunggal, kombinasi hasil keadaan komponen seperti:

- 1) Unsur pokok (misalnya jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka).
- 2) Berfungsinya unsur-unsur didalam sistem (misalnya peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial).
- 3) Pemeliharaan batas (misalnya kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi (Sztomka,2010: 3)

Sistem sosial yang kompleks menciptakan suatu keseimbangan dan kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerjasama atau konflik dan lain sebagainya. Bila dipisah komponen dan dimensi utamanya, secara tidak langsung menyatakan kemungkinan perubahan sebagai berikut:

- 1) Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain, menjadi anggota tertentu demobilitas gerakan sosial dan bubarnya suatu kelompok).
- 2) Perubahan struktur (misalnya terciptanya ketimpangan, kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan dan kerjasama).

- 3) Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok atau satu kelompok oleh kelompok lain, demokratisasi keanggotaan, dan penaklukan) (Sztomka, 2010:4).

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa perubahan merupakan suatu keadaan dimana terjadi pergeseran nilai dan norma beserta keseluruhan sistem yang ada, dan menjadi suatu sistem dan nilai yang baru.

5. Teori Interaksi Sosial

a. Definisi Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. interaksi sosial adalah sebuah bentuk hubungan yang dibangun antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, dimana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Soekanto, 2010:55). Interaksi sosial terjadi karena adanya sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh pelakunya dan kemudian di dalamnya terjadi kontak sosial yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota terjadi karena *commitment* mereka terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan

pendapat dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka untuk membentuk keselarasan satu sama yang lain dalam sesuatu integritas sosial.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Misalnya di daerah yang kondisi geografisnya gersang, maka akan menuntut seseorang lebih bersuara kasar dan lantang, apabila ada sekelompok atau pendatang dengan maksud dan tujuan tertentu sangat dimungkinkan akan berbenturan apabila pendatang yang dimaksud berasal dari daerah yang subur. Perbedaan ini akan menimbulkan benturan, guna memperoleh suatu keseimbangan antara kedua belah pihak, maka terjadilah suatu adaptasi, dimana adaptasi ini terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi (Soerjono Soekanto,2010: 56-57).

Menurut S.S Sargent, dalam Slamet Santoso (2009:11) interaksi sosial pada pokoknya memandang tingkah laku sosial yang selalu dalam kerangka kelompok seperti struktur dan fungsi dalam kelompok. Jadi tingkah laku sosial individu dipandang sebagai akibat adanya struktur kelompok, seperti tingkah laku pimpinan atau tingkah laku individu yang berfungsi sebagai anggota kelompok.

Menurut Bonner interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika kelakuan individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya (Slamet Santosa, 2009: 11).

b. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan juga berbentuk pertikaian atau pertentangan (*conflict*). Menurut Gillin dan Gilin dalam Soerjono Soekanto (2010:65) bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua yaitu dengan proses asosiatif dan disosiatif, proses asosiatif terdiri dari berbagai jenis yang diantaranya:

1) Kerja sama

Kerja sama merupakan sebuah proses dimana terjadi suatu kesadaran adanya kepentingan yang sama didalamnya yang kemudian melakukan sebuah tindakan guna memenuhi kebutuhannya.

2) Akomodasi

Akomodasi adalah sebuah bentuk usaha untuk mengurangi pertentangan antara orang perorang atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat akibat perbedaan paham atau pandangan.

3) Asimilasi

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Proses disosiatif atau juga disebut dengan *oppositional processes* terdiri dari:

1) Persaingan (*competition*)

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang nantinya akan menjadi pusat perhatian umum dengan menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman.

2) Kontravensi (*contravention*)

Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian, kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur kebudayaan golongan tertentu.

3) Pertentangan (*conflict*)

Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan

atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan sebuah ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2010: 65-91).

6. Teori Konflik

Konflik merupakan perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. (Pruit dan Rubin, 2004: 27).

Menurut Webster istilah *conflict* dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Dean G. Pruit mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.

Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Pengertian konflik di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, dan tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan

muncul suatu kondisi yang kurang baik baik dalam individu maupun kelompok.

7. Konsep Dampak Sosial

Secara etimologis dampak artinya pelanggaran, tubrukan, atau benturan, sedangkan pendekatan secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak sosial mempunyai dua sifat yaitu bersifat positif dan bersifat negatif, analisisnya yang sering kita ketahui adalah *Manifestasi* dan *Latency*. *Manifestasi* mempunyai sebuah kecenderungan harapan yang diinginkan dari suatu proses sosial yang terjadi, sedangkan *Latency* sebagai bentuk yang tidak diharapkan, tetapi secara alamiah selalu menyertai atau muncul.

B. Penelitian Relevan

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Widya Lutfy (2001) mahasiswa Universitas Gajah Mada yang berjudul “Dampak kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi para pedagang di pasar induk Giwangan Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang relokasi pedagang pasar *shopping* dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi

pedagang eks pasar *shopping*.

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *before and after*. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengupas tentang dampak dari sebuah kebijakan publik yaitu relokasi pedagang pasar *shopping* ke-pasar Giwangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap relokasi pedagang pasar *shopping* sebagai sebuah rangkaian proses kebijakan yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pasar *shopping* ini memang memerlukan kebijakan yang efektif dalam rangka penataan kawasan pasar Kota Yogyakarta. Terbukti dengan bersihnya pasar *shopping* dan sekitarnya sehingga kawasan tersebut kini menjadi lebih tertata dan rapi.
- b. Membawa perubahan tersendiri bagi sistem perdagangan yang dijalankan oleh para pedagang eks. Pasar *shopping* setelah mereka menempati lokasi pasar baru yakni pasar induk giwangan. Perubahan paling utama yang terjadi pada sistem perdagangan di pasar induk Giwangan adalah perubahan dalam alur distribusi. Meskipun komoditas yang dijual sama, yakni sayuran dan buah-buahan, namun alur distribusi di pasar giwangan menjadi lebih rumit jika dibandingkan dengan alur distribusi sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang dampak kebijakan tentang relokasi untuk para pedagang. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Desi Widya Lutfy dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang relokasi pasar dan dampak yang ditimbulkan di pasar *shopping*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hanya untuk mengetahui dampak sosial relokasi pasar yang timbul dari Ngasem ke Dongkelan.

2. Hasil penelitian relevan sebelumnya sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Eliyani (2012) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Dampak relokasi pasar Imogiri terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak relokasi Pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, dan untuk mengetahui dampak relokasi pasar Imogiri terhadap kondisi ekonomi pedagang di pasar Imogiri kecamatan Imogiri., dan kondisi sosial serta dampak relokasi pasar terhadap kondisi ekonomi pedagang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan mengenai dampak relokasi terhadap terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

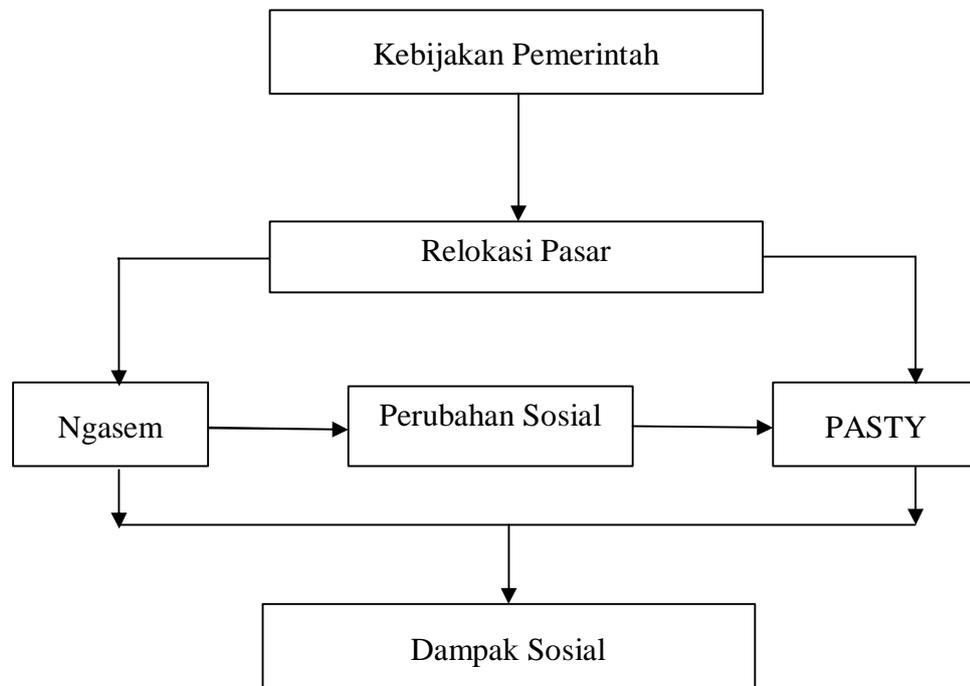
Relokasi pasar tersebut memberikan dampak positif terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan dan terciptanya peningkatan interaksi yang baik. Selain daripada itu, faktor lokasi yang strategis juga memberikan dampak yang cukup baik bagi para pedagang dengan bertambahnya pelanggan. Setelah relokasi modal dagangan mengalami peningkatan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan penulis adalah membahas tentang dampak relokasi pasar, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat relokasi pasar. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Dwi Eliyani juga berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, yaitu berada di Pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, Pasar Ngasem ke Dongkelan Kota Yogyakarta.

C. Kerangka Pikir

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Tujuan dari pada kebijakan ini yaitu, untuk mengalokasikan pasar yang semula berada di Ngasem, ke PASTY(Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta), agar menjadi pasar yang ramah lingkungan bersih dan lebih nyaman untuk dijadikan tempat berusaha dan berdagang. Relokasi pasar tersebut sudah

terencana namun untuk pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lambat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, dengan anggapan bahwa para pedagang sudah nyaman dengan keadaan yang ada di pasar Ngasem. Namun seiring dengan berjalanya waktu maka, pasar Ngasem berpindah ke PASTY pada tanggal 22 april tahun 2010. Adanya perpindahan pasar dari Ngasem ke PASTY, pastinya akan memunculkan sebuah perubahan sosial, baik perubahan secara teknis maupun peraturan-peraturan yang ada. Perubahan-perubahan ini dapat memunculkan sebuah dampak yakni berupa dampak sosial maupun ekonomi. Dampak sosial ekonomi inilah yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini.



Bagan 1. Kerangka Pikir